

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang, terutama di daerah pedesaan (masyarakat petani). Pernyataan tersebut didukung oleh Jhingan (2004), yang mengungkap bahwa negara terbelakang atau berkembang adalah negara yang dicirikan dengan kemiskinan seperti tercermin pada pendapatan perkapita yang rendah. Berdasarkan pendapat Jhingan tersebut, diketahui bahwa pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam perekonomian.

Menurut Todaro (2004), bahwa pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi sesuai pandangan ekonomi baru. Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2003). Kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Adapun yang dimaksudkan dengan kemiskinan mutlak adalah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis

kemiskinan tertentu, sedangkan kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan atau erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari tingginya tingkat pengangguran suatu negara atau daerah tertentu. Akan tetapi kemiskinan tidak hanya diakibatkan oleh ketiadaan pekerjaan. Kondisi tersebut bisa juga terjadi karena kemalasan, ketidakmauan untuk bekerja keras yang hanya menunggu adanya pemberian dari orang lain. Selain itu persoalan kemiskinan juga dapat disebabkan kebijakan pemerintah yang justru tidak tepat sasaran. Menurut Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005), menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang mempunyai lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*proper*); (2) ketidakberdayaan (*powerless*); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*); (4) ketergantungan (*dependence*); dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pembangunan dengan mengupayakan pelaksanaannya secara bersama-sama dan sistematis baik oleh hirarki pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, koperasi dan lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, guna mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya sosial dan sumberdaya alam secara bijak dan berkesinambungan, di dalam semangat kebersamaan. Nuansa yang dikembangkan adalah gotong royong, saling memberi dan kooperatif (BAPPEDA, 2013).

Badan Pusat Statistik (2009) menyatakan bahwa seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan

kriteria tersebut, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010 mencapai angka 10,48 % dari total jumlah penduduk. Angka tersebut masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat yang hanya mencapai angka 9,39 % dari total jumlah penduduk. Kemudian pada tahun 2012, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota turun menjadi 8,9 % dari total jumlah penduduk yang artinya masih ada sekitar 31.700 orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut turun dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2010 yang tercatat sebanyak 36.510 orang. Jika diperhatikan lebih lanjut, pada periode 2001-2013 angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami fluktuasi yang relatif kecil, namun dalam tujuh tahun terakhir (2007-2013) kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki *trend* yang menurun. (Susenas 2010-2012).

Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki *trend* yang menurun tapi masalah tersebut masih menjadi persoalan yang penting untuk diperhatikan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan diantaranya adalah pengangguran, pendidikan, dan upah minimum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Jelebuk. Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukannya Wijanarko memberikan saran agar pemerintah harus melakukan upaya intensif pengentasan kemiskinan diantaranya dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan penyediaan layanan pendidikan.

Sukirno (2011) menjelaskan tentang bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa dengan buruknya tingkat pengangguran di suatu daerah akan mengurangi tingkat pendapatan masyarakat

yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Dengan adanya kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan akan meningkatkan angka partisipasi kerja yang sekaligus menurunkan tingkat pengangguran yang tentu akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan.

Selanjutnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan juga penting untuk diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang semakin baik mengindikasikan mutu modal manusia yang semakin baik juga. Dengan semakin baiknya modal manusia yang dimiliki akan meningkatkan produktivitas manusia tersebut yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan individu. (Becker, Schultz, dalam Satria, 2008). Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran program pengentasan kemiskinan dapat digiatkan melalui peningkatan mutu modal manusia yang dapat dicapai melalui pendidikan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak yang dibutuhkan pekerja dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang. (Prastyo, 2010). Di Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, tingkat upah minimum ditentukan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2004 hingga 2013, tercatat nilai UMR mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 12% pertahun hingga pada tahun 2013 UMR

Kab. Lima Puluh Kota berada pada angka Rp. 1.350.000,-. Dengan konsistensi kenaikan UMR setiap tahunnya, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaruhnya terhadap kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam periode 2001-2013 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding Sumatera Barat adalah yang paling tinggi. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah dalam usaha mengatasi kemiskinan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang dan tujuan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis perkembangan Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menganalisis pengaruh Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai Pengangguran, Kemiskinan dan Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sebagai bahan acuan bagi penulis dan pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang topik dan masalah yang sama di masa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan empiris dan pembahasan, Bab VI Kesimpulan dan Saran.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam pembahasan di bab selanjutnya.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

**BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai kondisi geografis dan demografi, dan keuangan daerah Kabuapten Lima Puluh Kota.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis data, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

